

EKSPLORASI CAGAR BUDAYA SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA DENGAN KONSEP *INTEGRATED TOURISM* DI KABUPATEN CILACAP

Laely Armiyati^{1)*}

¹⁾Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA

ABSTRACT - *This study aims to explore and identify cultural heritage in the area of Cilacap Regency, Central Java Province. The research uses qualitative which is collected by three method namely observation, interview, and document study. The data is validated using source and methods triangulation techniques, then it is analysed by interactive model analysis and mapping the heritage with integrated tourism concept. The results showed that there are 84 cultural heritage reserves that have been inventoried and researched by the Department of Tourism, Youth, and Sports Cilacap Regency (Formerly Department of Tourism and Culture), but only 6 cultural heritage that has been registered in the national registration. Rgearding to mapping, the research found that the cultural heritage can be grouped into two types of tourism, namely educational tourism and religious tourism. For educational tourism itself can be grouped into four period, which are the period of Hindu-Buddhist, Islam, Colonial, and Japan.*

Keywords: Cultural heritage, Integrated Tourism, Cilacap

Pendahuluan

Memasuki era pasar bebas, Pemerintah Indonesia diharuskan untuk memiliki strategi mumpuni sebagai upaya menjaga eksistensi penduduknya. Salah satu strategi yang dicanangkan adalah dukungan kepada ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Menurut Pradesh, pariwisata merupakan sektor yang paling cepat tumbuh dan punya peranan besar dalam perekonomian dunia dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, tidak mengherankan apabila Arief Yahya, Menteri Pariwisata, menyatakan bahwa pada tahun 2016, sektor pariwisata diproyeksikan memberi kontribusi lima persen pada PDB Nasional dengan devisa sebanyak Rp172 triliun, penciptaan lapangan kerja untuk 11,7 juta orang, serta kunjungan wisman sebesar 12 juta orang. Proyeksi ini didasarkan pada pencapaiannya di tahun 2015 yang berkontribusi sebesar delapan persen dengan menghasilkan devisa sebanyak 240 trilyun rupiah, menciptakan lapangan kerja untuk 13 juta orang, dan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung dari luar negeri adalah

* Penulis Koresponden, email :laelyarmiyati@uhamka.ac.id

adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang saat ini sedang dirancang. (Silva, 2015)

Besarnya pendapatan negara dari sektor pariwisata yang mendorong pembangunan nasional, tentu saja tidak dapat lepas dari peranan daerah. Daerah yang telah diberi kewenangan sendiri, diberikan kebebasan untuk mengelola dirinya sendiri dan diharapkan dapat menyediakan dan menggali potensi yang ada, termasuk dalam mengelola sektor pariwisata sebagai salah satu sumber keuangan. Selaras dengan hal tersebut, Kabupaten Cilacap yang memiliki kebijakan dengan slogan “*Bangga Mbangun Desa*”, menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar ekonominya yang dicantumkan dalam misi Kabupaten Cilacap dalam RPJMD tahun 2012-2017, dengan sasaran pada penyerapan tenaga kerja sehingga ada penurunan angka pengangguran di Kabupaten Cilacap. (LKjIP Kabupaten Cilacap Tahun 2014)

Pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Cilacap, tampak dalam tingginya jumlah pengunjung dan penambahan destinasi wisata dalam kurun waktu empat tahun. Di tahun 2010, hanya ada sembilan destinasi wisata dengan penghasilan sebesar Rp 2.083.741.765,00, naik 104,82% dari tahun 2009 (Hero Idyel, 2011). Data dari BPS Kabupaten Cilacap tahun 2014, obyek wisata pantai menjadi primadona karena memiliki jumlah pengunjung tertinggi yaitu 36.533 orang, sedangkan untuk tertinggi kedua obyek *ecotourism* dengan pengunjung berjumlah 10.829 orang, dan yang terakhir adalah *curug*/ air terjun (BPS Kabupaten Cilacap tahun 2014) Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cilacap masih bergantung pada obyek wisata alam, bahkan cenderung memisahkan wisata sejarah dan budaya. Padahal, Kabupaten Cilacap memiliki banyak situs dan cagar budaya, terutama peninggalan era Kolonialisme, karena wilayah ini dulu pernah menjadi pusat pertahanan Belanda dan sumber ekonomi dengan potensi minyaknya. Sayangnya, banyak cagar budaya yang belum dimanfaatkan, bahkan terbengkalai, termasuk cagar budaya yang ada di Pulau Nusakambangan. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Tahun 2014).

Kajian Pustaka

Abad ke-20 merupakan puncak kesadaran masyarakat dunia atas pentingnya pelestarian cagar budaya yang diimplementasikan dengan pengenalan dan perlindungan bagi cagar budaya melalui teknologi (Suarez, Alonso, Sendra, 239). Umass Amherst Center for Heritage and Society (<http://www.umass.edu/chs/about/whyheritage.html>) menyatakan bahwa cagar budaya yang dilestarikan dapat memegang peranan penting bagi restorasi sosial bangsa, wilayah, dan komunitas lokal. Lebih lanjut, juga disampaikan bahwa:

... in the coming years the issues of cultural heritage, social identity, and collective memory will all become serious elements of larger social programs. Consequently, there will be a growing need for American professionals who are soundly educated both in the historiographical disciplines and in the important contemporary aspects of heritage such as economics, sociology, urban planning, and community affairs. (<http://www.umass.edu/chs/about/whyheritage.html>)

UNESCO (2012) menyatakan bahwa pelestarian cagar budaya berkontribusi pada sustainable development suatu bangsa. Benda cagar budaya yang terawat dengan baik secara langsung akan berkontribusi secara ekonomi, yaitu meningkatkan devisa negara melalui bidang pariwisata. Kebudayaan yang unik dan kondisi lingkungan yang masih alami, merupakan daya tarik bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2010, Bab I, Pasal I, Cagar Budaya adalah:

... warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan *keberadaannya* karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Lebih lanjut, ditegaskan oleh Undang-undang nomor 11 tahun 2010 yang menyatakan bahwa yang termasuk dalam cagar budaya adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Melalui pelestarian cagar budaya, generasi saat ini dapat melihat kekuatan dan estetika nenek moyangnya. Karenanya, cagar budaya yang merupakan tolak ukur tinggi rendahnya peradaban yang dimiliki. Generasi saat ini dapat melihat kekuatan nenek moyangnya melalui peninggalannya. Dengan demikian, secara tidak langsung cagar budaya mewariskan pula nilai karakter yang dapat menjadi cermin bagi generasi sekarang. Mencermati urgensi tersebut, UNESCO melalui “*Strategic Action Plan for the Implementation of the Convention, 2012-2022*”, mengintegrasikan sustainable development sebagai bagian dari pelestarian cagar budaya, dengan fokus utama pada perlindungan dan konservasi cagar budaya yang mempertimbangkan kebutuhan lingkungan, sosial, dan ekonomi pada masa kini dan masa depan, yang kemudian dikelola dalam konsep “*connecting conservation to communities*”. (UNESCO, 2012)

Salah satu cara yang dilakukan untuk melestarikan cagar budaya di Kabupaten Cilacap adalah melalui pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya. Oleh karena itu, perlu adanya eksplorasi yang dilanjutkan dengan pemetaan cagar budaya dengan menggunakan konsep *integrated tourism*. *Integrated tourism* merupakan pengembangan dari konsep *integrated rural tourism* (IRT) yang merupakan salah satu strategi dalam proyek SPRITE (*Supporting and Promoting Integrated Tourism in Europe’s Lagging Rural Regions*), sebuah proyek penelitian dari negara-negara Uni Eropa (Stetic, 2012). Dalam model ini, dipaparkan bahwa pengembangan pariwisata tidak lagi harus berbasis pada wisata alam dan budaya, tetapi bisa juga dalam bentuk lainnya misalnya wisata ekonomi, wisata pendidikan, wisata religi, maupun wisata sosial. Oleh karena itu, Stetic (2009) mendeskripsikan atribut dari model *integrated tourism* meliputi:

Tabel 1. Atribut dari tujuan wisata

Tipologi Tujuan Wisata	Aspek Pengembangan	Peluang Pengembangan
Kota	Budaya, religi, sejarah	Monumen sejarah, institusi budaya, olahraga
Bisnis	Pusat bisnis, <i>congress centres</i> ,	Institusi bisnis
Pantai	Olahraga air dan pantai, alam	Sumber daya alam, fasilitas pendukung
Pulau	Alam, kebudayaan lokal,	Kenampakan alam dan buatan, potensi budaya lokal, infrastruktur
Pegunungan	Olahraga gunung, hiking, trekking	Kenampakan alam, infrastruktur
Desa/Kampung	Produk-produk pertanian, pekerjaan bertani, handicraft, rekreasi	Lingkungan alam, karakter etno-sosial, gastronomi
Budaya dan Sejarah	Kebudayaan dan sejarah lokal, agama	Bangunan sakral, bangunan bersejarah, kearifan lokal.
Destinasi Spa	Perawatan, <i>rest and recovery</i>	Suasana resort

Sumber: diolah dari Stetic (2009) dalam Stetic (2012)

Meskipun pengembangan model *integrated tourism* tidak dapat berkembang tanpa melibatkan pihak swasta, pun juga tidak lantas melupakan peran masyarakat sekitar. Oleh karena itu, model ini dapat berkembang dengan baik ketika ada sinergi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah daerah (Stetic, 2012; Monzonis, 2014).

Di beberapa negara, seperti Serbia, Rumania, India, Amerika Serikat, China, dan Malaysia, konsep *integrated tourism* sudah dikembangkan dengan fokus *rural area*. Meskipun demikian, *integrated tourism* harus tetap mempertimbangkan beberapa hal yang sudah ditetapkan oleh The World Travel and Tourism Council (WTTC), the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) and dan Earth Council (EC) dalam Agenda 21 untuk industri travel dan pariwisata yaitu “*towards Environmentally Sustainable Development*”. Keberadaan *sustainable tourism development* merupakan upaya untuk menjaga hak wisatawan dan penduduk lokal dalam konteks pariwisata. Terdapat tiga pilar utama dalam konsep *sustainable tourism development* yang harus menjadi pedoman dalam pengembangan *integrated tourism*, yaitu (Dangi dan Jamal, 2016):

1. Pilar ekonomi, yaitu memberikan kemakmuran bagi seluruh pihak dengan mengoptimalkan efektivitas pembiayaan untuk jangka panjang.
2. Pilar Sosial, yaitu menghargai hak asasi manusia dan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, terutama untuk masyarakat lokal.
3. Pilar lingkungan, yaitu pemeliharaan sumber daya, khususnya yang tidak dapat diperbaharui, dan mengurangi polusi serta menghargai peninggalan bersejarah.

Metode Penelitian

Untuk memperoleh data tentang cagar budaya yang ada di kawasan Kabupaten Cilacap, penelitian ini bersifat eksploratif dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kawasan cagar budaya di Kabupaten Cilacap. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari analisis dokumen yang mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang ada di sekitar kawasan cagar budaya, sejarawan, dan petugas Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap. Observasi dilakukan dengan mengunjungi cagar budaya di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, data yang diperoleh diuji validitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi metode. Analisis penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif, yaitu teknik analisis yang aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Setelah pengumpulan data, peneliti hanya bergerak dalam tiga komponen analisis.

Hasil Dan Pembahasan

Sejarah Kabupaten Cilacap

Cilacap, kota di sebelah selatan pulau Jawa, merupakan salah satu kota di Nusantara yang mengalami perkembangan pesat pasca diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Meskipun demikian, wilayah ini –yang dikenal dengan daerah Donan– sebenarnya sudah lama diketahui sebagai bagian dari Kadipaten Banyumas. Kabupaten Cilacap terletak di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Cilacap yang merupakan daerah terluas di Jawa Tengah mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan), yang apabila dihitung sekitar 6,9 persen dari luas wilayah Jawa

Tengah. Daerah ini memiliki batas wilayah sebelah selatan adalah Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Propinsi Jawa Barat. Secara astronomis, kabupaten ini terletak diantara $108^{\circ}4-30^{\circ}$ - $109^{\circ}30'30''$ garis Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'20''$ garis Lintang Selatan.

Dalam cerita rakyat Cilacap, diyakini bahwa pembukaan daerah Donan yang saat itu dikenal sebagai daerah wingit oleh utusan Adipati dari Banyumas, merupakan cikal bakal adanya masyarakat di wilayah ini. Namun terlepas dari cerita tersebut, penelusuran tentang cikal bakal Cilacap dapat ditelusuri sejak akhir Kerajaan Majapahit (1294-1478). Pada saat itu, Kabupaten Cilacap terbagi ke dalam tiga wilayah yang dikuasai oleh tiga keraton berbeda, yaitu Kerajaan Majapahit yang menguasai Wilayah Ki Gede Ayah dan wilayah Ki Ageng Donan, Wilayah Kerajaan Nusakambangan dan wilayah Adipati Pasir Luhur, serta Wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dalam perkembangannya, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran yang jatuh pada tahun 1579 setelah diserang oleh kerjaan Islam Banten dan Cirebon, kemudian menyerahkan bagian timur Kerajaan Pakuan Pajajaran kepada Kerajaan Cirebon. Sejak saat itu seluruh wilayah cikal-bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur berada dibawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang dan di sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Selanjutnya, setelah Kerajaan Pajang digantikan oleh Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587-1755, maka daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada Kerajaan Mataram. Ekspansi Mataram ke Kabupaten Galuh yang berada di bawah kerajaan Cirebon pada tahun 1595, juga menjadi bagian penting dalam penaklukan beberapa wilayah yang kini tergabung dalam Kabupaten Cilacap. (<http://cilacapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=2>)

Penguasaan Belanda atas wilayah Cilacap, dimulai sejak Perjanjian antara Belanda dengan Mataram pada tanggal 5 Oktober 1705 mengenai tapal batas wilayah. Dalam perjanjian, disepakati bahwa wilayah kekuasaan Belanda dari batas sebelumnya di Pamanukan, Kerawang meluas ke sebelah timur sampai ke Sungai Losari, sebelah utara di Brebes dan Sungai Donan, serta sebelah selatan di Banyumas. Di perjanjian ini juga disebutkan bahwa Nusakambangan termasuk ke dalam wilayah Belanda. Meskipun Nusakambangan telah dikuasai, namun daerah Donan –nama Cilacap pada saat itu– belum dikuasai oleh Belanda hingga tahun 1830. (Wibowo, 2001, hal. 11) .

Perpecahan yang terjadi dalam kerajaan Mataram sebagai dampak dari Perjanjian Giyanti, membawa daerah Donan berada di bawah kepemimpinan Kasunanan Surakarta. Saat Kasunan dipimpin oleh Sunan Paku Buwono IV, diutuslah salah satu putra sunan bernama Raden Tumenggung Kertanegara III untuk pindah ke daerah Donan. Namun, karena enggan menghadapi kelompok bajak laut yang ada di Donan, Raden Tumenggung memilih untuk tinggal di daerah Ngajah (sekarang sebelah selatan Gombang, Jawa Tengah), sedangkan pasukan yang sudah terlanjur dibawa untuk menangkal bajak laut diserahkan kepada Raden Ronggo Kertarana, kemudian menetaplah mereka di daerah Tjongot Wetan. Sayangnya, tidak lama setelah kedatangannya ke Donan, pasukan ini diserang oleh bajak laut yang konon kabarnya berasal dari Celebes dan Borneo, seluruh pasukan dan pimpinannya dibunuh. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1737 Saka atau 1801 M. (Soedarto, dkk., 1975, hal. 34)

Keberadaan bajak laut di daerah Donan, membawa kekhawatiran seluruh penduduk yang pada saat itu berada di wilayah administratif bernama Kademangan, yang dipimpin oleh seorang Demang. Terdapat tiga Demang yang memimpin pada saat itu, yaitu Demag Wirajuda yang menguasai bagian timur, Demang Tjandrajuda yang memimpin bagian tengah, dan Demang Wangsengrana yang memimpin sebelah barat. Kekuatan

bajak laut yang sangat besar, membuat mereka tidak dapat mengatasinya. Oleh karena itu, didatangkanlah pasukan dari Kasunanan Surakarta untuk membantu mereka. Selanjutnya, untuk mengatasi bajak laut yang asal kedatangannya tidak dapat diprediksi, dibuatlah strategi pembagian kekuatan dalam tiga kelompok, yaitu Ki Djagapraja, yang ditugaskan untuk menjaga dan mengamati bajak laut dari arah Timur dengan daerah pertahanannya di Ujung Tenggara Kota Cilacap sekarang (Tjongot Wetan); Ki Djaga Laut, ditugaskan untuk mengamati daerah tengah, daerah pertahanannya dibangun di atas Segara Anakan; dan Ki Djaga Resmi, ditugaskan untuk menjaga daerah sebelah barat, daerah pertahanannya di muara Kali Citanduy (perbatasan Jawa Barat). (Soedarto, dkk., 1975, hal. 35) Strategi baru ini ternyata mampu menangkal bajak laut, karena sejak serangan tahun 1801, tidak ditemukan lagi berita penyerangan bajak laut di wilayah Donan. (Wibowo, 2001, hal. 14)

Pembukaan daerah Donan mulai terjadi lagi setelah disusunnya pemerintahan Hindia Belanda di Banyumas dengan menetapkannya sebagai daerah Karesidenan (*Residentie*) dan dihapuskannya Kadipaten Dajeuhluhur. Pada tanggal 22 Agustus 1831, Pemerintah Hindia Belanda mengangkat seorang Residen di Banyumas bernama G. De Seriere serta diangkat pula Raden Tumenggung Tjakranegara III sebagai Bupati Banyumas. Sejak saat itu, dimulailah upaya pembukaan hutan Donan, yang diawali dengan diutusnya Raden Bei Tjakradimedja bersama dengan rombongannya. Tantangan yang dihadapi rombongan ini sangat besar, karena daerah yang harus dibuka dikelilingi oleh rawa dan banyak binatang buas. Selain itu, jalan menuju hutan ini pun juga belum ada. Dengan tekad kuat, merekapun menyusuri pantai di wilayah selatan, hingga sampailah di sebuah ujung dari lekukan pantai selatan, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1839. (Soedarto, dkk., 1975, hal. 42) Ujung lekukan ini menyerupai sebuah mata bajak, sehingga dikenal dengan daerah "Cacab" yang kemudian populer di kalangan Belanda dengan kata "Tlacap". Hingga akhirnya pembentukan *Onder Afdeling Cilacap* ditandai oleh dikeluarkannya besluit Gubernur Jenderal D. De Erens tanggal 17 Juli 1839 Nomor 1, yang memutuskan bahwa demi kepentingan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih rapi di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pelabuhan Cilacap, maka sambil menunggu usul organisasi distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya, satu dari tiga Asisten Resident di Karesidenan ini akan berkedudukan di Cilacap. (<http://cilacapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=2>)

Kekhawatiran terhadap pertahanan kawasan Banyumas Selatan oleh Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas maka dengan Besluit tanggal 27 Juni 1841 Nomor 10 ditetapkan : "*Patenschap*" Dayeuhluhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan satu afdeling tersendiri yaitu afdeling Cilacap dengan ibu kota di Cilacap, yang menjadi tempat kedudukan Kepala Bestuur Eropa yaitu Asisten Resident dan Kepala Bestuur Pribumi Ranga atau *Onder Regent*. Dengan demikian Pemerintah Pribumi dinamakan *Onder Regentschap* setaraf dengan Patih Kepala Daerah Dayeuhluhur. Adapun batas *Onder Regentschap* Cilacap menurut rencana Residen Banyumas, De Sturier, tertanggal 31 Maret 1831 adalah dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gunung Prenteng, selanjutnya menuju puncak, turun ke arah tenggara pegunungan Kendeng, menuju puncak Gunung Gumelem (Igir Melayat). Berikutnya ke arah selatan mengikuti batas wilayah Karesidenan Banyumas menuju ke laut. Dari sana ke arah barat sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu. Pada saat itu, luas kawasan *Onder Regentschap* Cilacap masih lebih besar dari luas Kabupaten Cilacap sekarang. (Wibowo, 2001)



Gambar 1. Wilayah Karesidenan Banyumas pada tahun 1900 (Tjilatjap, Java – Residentie Banjoemas, 1900 (excerpt) Collection of Koninklijk Instituut voor de Tropen – Amsterdam, diadopsi dari http://photobucket.com/gallery/http://s161.photobucket.com/user/joanth/media/Tjilatjap1900a_inzet-rec-1.jpg.html)

Pada masa Residen Banyumas ke-9 Van de Moore mengajukan usul Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober 1855 yang ditandatangani Gubernur Jenderal Duijmaer Van Tuist, kepada Menteri Kolonial Kerajaan Belanda dalam Kabinet Sreserpt pada tanggal 29 Desember 1855 Nomor 86, dan surat rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 Nomor 7/A disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial bermakna dua yaitu permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi bestuur pribumi dan pengeluaran anggaran lebih dari F.5.220 per tahun yang keduanya memerlukan persetujuan Raja Belanda, setelah menerima surat rahasia Menteri Kolonial Pemerintah Hindia Belanda dengan besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856 Nomor 21 antara lain menetapkan Onder Regentschap Cilacap ditingkatkan menjadi *Regentschap* (Kabupaten Cilacap). <http://cilacapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=2>) Sebagai tindak lanjut atas keputusan ini, Belanda mengangkat Raden Tumenggung Tjakrawedana I sebagai bupati pertama. Bupati Tlajap berada di bawah koordinasi langsung Residen Banyumas, pada saat itu gaji yang diperoleh Bupati sebesar 900 gulden. Pada masa bupati ini, meskipun jumlah penduduknya baru sebanyak 35.000 jiwa, sudah mulai dilakukan pembangunan infrastruktur seperti bangunan rumah/pendopo kabupaten, jalan, selokan untuk pertanian, serta yang paling fenomenal adalah pembuatan sudetan kali Serayu untuk menghubungkan Tlajap dengan daerah lain (karena secara geografis, wilayah Tlajap terletak di paling ujung selatan) agar terbentuk jalur sungai untuk mengangkut barang perdagangan, sudetan ini kemudian dikenal dengan sebutan “Kali Yasa” (Yasa –bhs Jawa- artinya buatan). (Soedarto, dkk., 1975, hal. 42) Keberadaan Kali Yasa memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian rakyat Tlajap. Berikut adalah daftar nama Bupati Cilacap.

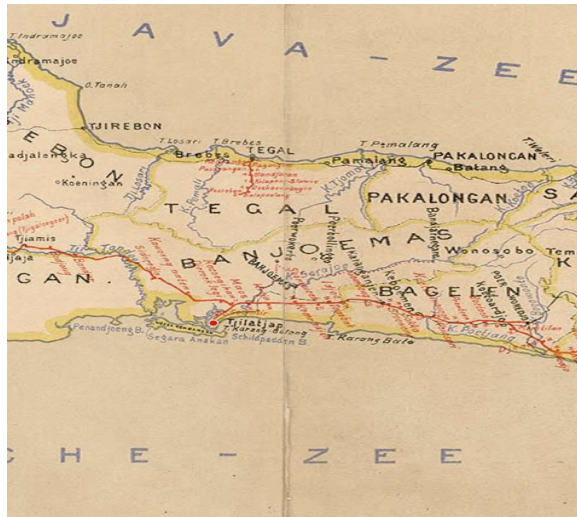
Tabel 2. Bupati yang Pernah Memerintah di Kabupaten Cilacap

No	Nama	Periode Jabatan
1	Rd. Tumenggung Tjakrawedana I	1856–1873
2	Rd. Bei Tjakrawedana II	1873-1875
3	Rd. Bei Tjakrawedana III	1875-1881
4	Rd. Mas Adipati Arya Tjakrawerdaya	1882-1927

5	R.M Adipati Arya Tjakra Sewaya	1927-1950
6	Raden Mas Soetedjo	1950-1952
7	R. Witono	1952-1954
8	Raden Mas Kodri	1954-1958
9	D.A Santoso	1958-1965
10	Hadi Soetomo	1965-1968
11	HS. Kartabrata	1968-1974
12	H. RYK. Moekmin	1974-1979
13	Poedjono Pranyoto	1979-1987
14	H. Mohamad Supardi	1987-1997
15	H. Herry Tabri Karta, SH	1997-2002
16	H. Probo Yulastoro, S.Sos, MM, M.Si	2002-2011
17	H. Tatto Suwarto Pamuji	2011-sekarang

Sumber: <http://cilacapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=2>

Penguasaan Cilacap oleh Belanda, terkait erat dengan upaya Belanda untuk menangkal serangan orang-orang Eropa (termasuk Inggris). Diawali oleh penempatan 30 artileri pada tahun 1819 di kawasan Nusakambangan –wilayah Nusakambangan telah dikuasai Belanda sejak tahun 1705-, yang kemudian pada tahun 1830 ditambahkan 21 artileri, 64 infanteri, dan satu petugas medis. Selanjutnya untuk memperkuat sistem pertahanan, Raja William I menganggarkan 1.000.000 gulden untuk memperkuat pertahanan Jawa dari serangan bangsa lain. Oleh karena itu sekitar tahun 1836 dimulailah pembangunan Benteng Karang Bolong dan Banju Njappa di pantai bagian timur laut pulau Nusakambangan. (Van Zoonen, tt) menurut Widodo (1975: 15) benteng pertahanan itu digunakan untuk menghadapi kapal musuh yang berpotensi masuk ke sekitar semenanjung atau pelabuhan. Hal ini dapat dilihat dari desain arah sasaran tembak kedua benteng yang tepat ke arah pintu masuk semenanjung atau pelabuhan. Pasca pembangunan benteng di kawasan Nusakambangan, ternyata dianggap belum mampu menyempurnakan sistem pertahanan Belanda di ujung selatan. Alhasil, pada tahun 1844 Mayor Jenderal Von Gagern melakukan perjalanan mengelilingi Jawa untuk mempelajari sistem pertahanan yang tepat. Dia kemudian merekomendasikan Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Cilacap perlu dibangun benteng, terutama di jantung utama Cilacap agar sistem pertahanan semakin kuat. Usul ini pun disetujui oleh Raja Willem III yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan kerajaan untuk membangun sistem pertahanan di Jawa, termasuk perbaikan pada benteng yang telah dibangun (Karang Bolong dan Banju Njappa). Hingga akhirnya di bagian selatan Cilacap akan dibangun sebuah benteng untuk pertahanan di teluk. Selain itu, pemerintah Belanda juga mulai membangun perumahan untuk para petugas. Meskipun terbuat dari bambu, tapi dikatakan bahwa perumahan ini yang terindah di kawasan Jawa.



Gambar 2. Peta Cilacap yang diproduksi tahun 1893 (Kaart van Nederlandsch-Indie 1893 [naar oorspronkelijke tekening van H.Ph.Th.Witkamp]. Printed by JH de Bussy – Amsterdam. Collection of Koninklijk Instituut voor de Tropen – Amsterdam, diadopsi dari <http://photobucket.com/gallery/http://s161.photobucket.com/user/joanth/media/Tjilatjap.jpg.html>)

Pada tahun 1850 terjadi bencana malaria di Cilacap, yang menyebabkan banyaknya penduduk di Cilacap terjangkit penyakit ini. Padahal, saat itu pemerintah Belanda sedang membutuhkan banyak tenaga kerja, alhasil diambillah keputusan untuk menggunakan narapidana agar kebutuhan tenaga kerja terpenuhi. Untuk itu, pada tahun 1856 di Cilacap dibangun sebuah penjara yang terbuat dari batu dan bata merah untuk menampung 300 narapidana, yang diikuti oleh penunjukkan seorang bupati di Cilacap pada tahun 1857. Memasuki tahun 1861, pembuatan benteng di ujung semenanjung Cilacap mulai dilakukan, dimana pembangunannya melibatkan 500 pekerja lepas dan 350 narapidana. Selain membangun benteng, juga dibangun jalur militer dari Cilacap ke Priangan. Hingga akhirnya pada tahun 1869, pembuatan benteng di bagian selatan Cilacap sudah selesai, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan di bagian utara (Van Zoonen, tt) Sejak saat itu, pemerintah Belanda mulai menaruh perhatian ke wilayah ini.

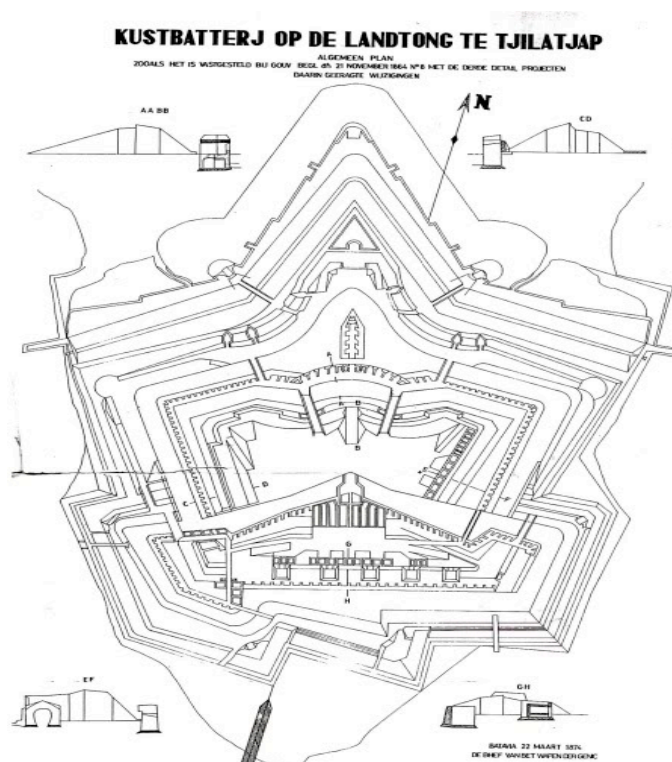
Pada tahun 1874, komandan tentara di Hindia Belanda yang didukung oleh Gubernur Jenderal, ingin membuat benteng di sebelah utara untuk menangkal serangan dari arah Teluk Penyus (lihat gambar 4.4) Namun, kebijakan para menteri di Belanda yang saat itu sedang menghemat anggaran, menyatakan bahwa benteng akan dibuat dalam bentuk yang sederhana, dengan sedikit ruang tempat perlindungan, dan sedikit ruangan anti bom. Kebijakan ini diambil dikarenakan ada perbedaan pendapat tentang bagaimana upaya pertahanan kawasan Jawa di antara para ahli militer Belanda, yaitu dengan membangun benteng, dengan memperbanyak tentara (*mobile army*), dan memperbanyak Angkatan Laut. Alhasil, desain pembangunan benteng pun disederhanakan. (Van Zoonen, tt) Hingga akhirnya pada tahun 1879, benteng Cilacap yang terletak di sebelah utara berhadapan dengan Pantai Teluk Penyus dianggap selesai, yang kemudian diberi nama Kusbatterj Op De Landtong Te Tjilatjap, saat ini populer dengan Benteng Pendem. (Van Zoonen, tt; Wibowo, 2001)

Dalam kurun waktu tiga tahun, berdirinya tiga benteng, yaitu Karang Bolong, Banju Njappa, dan Benteng Pendem, membuat Cilacap merupakan pertahanan yang paling modern dan paling kuat di Indonesia. Di tempat tersebut ditempatkan pasukan yang berasal dari pribumi dan tentara Eropa, pada tahun 1883 tercatat ada 442 orang pasukan,

yang terdiri dari 214 orang Eropa dan 228 orang Indonesia. Namun, pada tahun 1884 wabah malaria menyerang pasukan, hingga jumlahnya berkurang menjadi 336 orang. Hingga tahun 1888, wabah malaria belum juga hilang, pemerintah Belanda kemudian mengirim semua pasukan keluar dari Cilacap, pasukan infantri dikirim ke Kedong Kebo (dekat Purworejo) dan pasukan artileri ke Salatiga. Meskipun demikian, tetap ada 83 prajurit yang ditempatkan di benteng-benteng Cilacap. (Van Zoonen, tt; Wibowo, 2001) Pada saat itu, Malaria merupakan salah satu wabah yang sangat mengancam, karena banyak pasukan Belanda yang terbunuh. Oleh karena itu, Cilacap sering dikenal sebagai kuburan orang Belanda yang ada di Cilacap. (Wawancara Unggul Wibowo, 2017)

Perkembangan sistem pertahanan di Kota Cilacap, berdampak pada pembangunan infrastruktur, diantaranya jalur transportasi. Pada tahun 1888 jalur kereta api yang menghubungkan Cilacap dan Yogyakarta telah selesai. Kemudian pada tahun 1894, jalur kereta api antara Cicalengka dan Maos juga siap digunakan, yang berarti mempermudah transportasi dari Cilacap menuju Jakarta via Bandung. Kemudahan transportasi, berdampak positif bagi Cilacap, terutama bagi perkembangan ekonomi dan sosial budaya. Jika sebelumnya banyak yang tidak mengenal Cilacap, karena letaknya yang memang berada di “daerah buntu”, setelah dibangunnya jalur kereta, menjadi semakin mengenal kawasan ini.

Memasuki tahun 1892, Benteng di Cilacap dan Nusa Kambangan akan ditutup, karena pemerintah Belanda akan menggunakan Angkatan Laut dan pasukan *mobile* (*mobile army*), pada saat bersamaan juga terdapat kebijakan untuk membuka Nusakambangan bagi masyarakat. Pada tahun 1905 Belanda kembali mendatangkan pasukan ke Cilacap –setelah wabah malaria berhasil diatasi dengan menggunakan kelambu-, yang meliputi satu kompi infanteri dan satu pasukan artileri. Namun pada tahun 1930 – 1938 seluruh pasukan perlahan ditarik dari Cilacap. Meskipun demikian, di benteng tetap ditempatkan 2 senjata pertahanan pantai, serta pusat komando untuk detasemen Cilacap. Hingga akhirnya pada tanggal 4 Maret 1942, pelabuhan Cilacap dibombardir oleh Jepang selama satu jam yang dilanjutkan pada hari berikutnya selama dua jam. Dalam penyerangan ini 450 orang terbunuh (mayoritas masyarakat sipil), serta banyak kapal yang sedang bersandar di pelabuhan pun rusak. Sejak itu, Cilacap berada di bawah kendali Pemerintah Jepang.



Gambar 3. Grand design Benteng Pendem Cilacap yang dibuat pada tahun 1874 (Van Hooten, tt)

Pada saat masuknya Jepang ke Indonesia, Cilacap menjadi pintu darurat orang-orang Belanda. Tentara Belanda yang berasal dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Birma dan Singapura, serta dari berbagai kota di Indonesia diperintahkan untuk pergi ke Cilacap agar dapat dimobilisasi keluar dari wilayah Nusantara menuju ke kota kecil di Australia Barat dan Srilanka. Stasiun Cilacap, menjadi saksi berkumpulnya orang-orang Belanda dari berbagai negara di Indonesia. Namun kemudian, stasiun ini dijatuhi bom dan banyak nyawa yang menjadi korban. (Wawancara Unggul Wibowo, 2017). Setelah dikuasai Jepang, banyak benteng Belanda yang diambil alih oleh Jepang dan dijadikan sebagai pusat pertahanan mereka di kawasan selatan.

Data Cagar Budaya di Kabupaten Cilacap

Pemerintah Kabupaten Cilacap di bawah koordinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (saat ini Dinas Pemuda, Pariwisata, dan Olahraga) mencatat ada 83 cagar budaya di Kabupaten Cilacap, yang meliputi 6 cagar budaya yang telah masuk dalam registrasi nasional dan 78 adalah obyek cagar budaya tidak bergerak yang masuk dalam penelitian di Kabupaten Cilacap. Berikut adalah data obyek cagar budaya tersebut.

Tabel 3. Data Obyek Cagar Budaya di Kabupaten Cilacap

No	Nama Obyek Cagar Budaya	Alamat
1	Benteng Pendem (<i>Kustbatterij op de Landtong te Cilacap</i>)	Benteng, Cilacap, Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53211
2	Watu Lingga	Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap
3	Mesjid Agung Darussalam	Desa Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah
4	Situs Candi Jambu	Desa Cilongkrang, Kec. Wanareja

5	Benteng Karang Bolong	Nusakambangan
6	Benteng Klingker atau <i>Banju Njappa</i>	Nusakambangan
7	Rumah Dinas Stasiun Kroya No. 1	Stasiun Kroya, Kec. Kroya
8	Rumah Dinas Stasiun Kroya No. 2	
9	Rumah Dinas PT KAI Kroya 3a/3b	
10	Rumah Dinas PT KAI Kroya 5a	
11	Rumah Dinas PT KAI Kroya 5b	
12	Rumah Dinas PT KAI Kroya 6a	
13	Rumah Dinas PT KAI Kroya 6b	
14	Rumah Dinas PT KAI Kroya 7	
15	Rumah Dinas PT KAI Kroya 8a	
16	Rumah Dinas PT KAI Kroya 16	
17	Rumah Dinas PT KAI Kroya 17	
18	Rumah Dinas PT KAI Kroya 18	
19	Rumah Tinggal No. 19	
20	Bedeng PT KAI No 1a, 2a, 3a, 4a, s.d. 10a	
21	Stasiun Maos	Kec. Maos
22	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 13	Kec. Maos
23	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 14	
24	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 15	
25	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 17	
26	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 18	
27	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 19	
28	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 20	
29	Stasiun Kesugihan	Kec. Kesugihan
30	Rumah Dinas Stasiun Kesugihan No. 1	Kec. Kesugihan
31	Stasiun Karangandri	Desa Menganti, Kec. Kesugihan

Prosiding Kolokium Doktor dan Seminar Hasil Penelitian Tahun 2017

32	Rumah Dinas Stasiun Karangkandri No. 1	
33	Rumah Dinas Stasiun Karangkandri No. 2	
34	Stasiun Gumilir	Kec. Gumilir
35	Rumah Dinas Stasiun Gumilir 2	Desa Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan
36	Rumah Dinas Stasiun Gumilir 3	
37	Rumah Dinas Stasiun Cilacap 1	Desa Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan
38	Rumah Dinas Stasiun Cilacap 2	
39	Rumah Tinggal BRI 1	Jl. A. Yani, Cilacap
40	Rumah Tinggal BRI 2	Jl. A. Yani, Cilacap
41	Rumah Tinggal No. 44	Jl Veteran, Cilacap
42	Rumah Tinggal No. 48	Jl. Veteran, Cilacap
43	Rumah Tinggal	Jl. A. Yani No. 2, Cilacap
44	Rumah Pelabuhan	Pelabuhan Perikanan
45	Dermaga Pelabuhan I	Pelabuhan Tanjungpura
46	Bunker Tanjung Intan 1	
47	Bunker Tanjung Intan 2	
48	Stasiun Jeruklegi	Jeruklegi
49	Rumah Dinas Stasiun Jeruklegi No.1	
50	Rumah Dinas Stasiun Jeruklegi No. 2	
51	Rumah Dinas Stasiun Jeruklegi No. 2a	
52	Stasiun Kawunganten	
53	Rumah Dinas Stasiun Kawunganten 3a	
54	Rumah Dinas Stasiun Kawunganten 3b	
55	Stasiun Gandrungmangu	
56	Rumah Dinas Stasiun Gandrungmangu No. 1	
57	Rumah Dinas Stasiun Gandrungmangu No. 2	
58	Stasiun Sidareja	
59	Rumah Sinder Kebunkaret Cilongkrang	Desa Cilongkrang, Cilacap
60	Kantor Afdeling	
61	Rumah Dinas PT KAI Meluwung 1	Meluwung, Cilacap
62	Rumah Dinas PT KAI Meluwung 2	Meluwung, Cilacap
63	Rumah Dinas PT KAI Meluwung 3	Meluwung, Cilacap

64	Rumah Dinas Stasiun Bedengan 1a s.d. 4a	Bedengan, Cilacap
65	Stasiun Cipari	
66	Rumah Dinas Stasiun Cipari I	
67	Makam Sumolangu (Mahfud Abdurrohman)	Gn. Selok, Cilacap
68	Benteng Jepang Gunung Selok 1	Gn. Selok, Cilacap
69	Benteng Jepang Gunung Selok	
70	SMP Negeri 8	Desa Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan
71	Benteng Jepang Pendem 4	
72	Bangunan E4 Mes	
73	Kantor Kasdim (Wakil Dandim)	Jl. Jend. Sudirman, Tegalsari, Cilacap
74	Rumah Dinas Dandim	Tegalsari, Cilacap
75	Rumah Piket Kodim Cilacap	Tegalsari, Cilacap
76	Sanggar Pramuka Kodim	Tegalsari, Cilacap
77	Kantor Minivet AD	
78	Kantor Dinas Pariwisata Cilacap	Jl. Jend. A. Yani, Sidakaya, Cilacap
79	Makam Hong Bangkok Suralaka	
80	Makam Kerkhof	Jl. Karang, Cilacap
81	Lonceng Kuno	Kantor Kabupaten Cilacap
82	Pintu Gerbang Kantor Bupati	Kantor Kabupaten Cilacap
83	Tempat Tidur Bupati I	Kantor Kabupaten Cilacap
84	Stasiun Cilacap	Desa Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan

Sumber: Laporan Inventarisasi Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Cilacap, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah 2013 dan hasil wawancara dengan Joko Waluyo Kepala Seksi Promosi Pariwisata Kabupaten Cilacap, 2017.

Selain obyek cagar budaya tersebut, Dinas Pariwisata juga saat ini sedang meneliti obyek cagar budaya berupa rumah adat yang ada di Desa Adiraja dan Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, yang berjumlah delapan rumah. Kedelapan rumah adat ini masih belum masuk daftar obyek cagar budaya dalam registrasi nasional. Pada tahun 2016, terdapat enam cagar budaya di Kabupaten Cilacap yang telah masuk registrasi nasional (perlindungan dan perawatan langsung oleh pemerintah pusat), yaitu Kantor Dinas Pariwisata Cilacap, Makam Hong Bangkok Suralaka, Makam Kerkhof, Lonceng Kuno, Pintu Gerbang Kantor Bupati, dan Tempat Tidur Bupati Cilacap. (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, 2016)

Pemetaan Cagar Budaya Dengan Konsep Integrated Tourism

Berdasarkan analisis terhadap cagar budaya yang tercatat dan sedang diteliti oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Cilacap, berikut adalah identifikasi cagar budaya dengan menggunakan konsep *integrated tourism*.

Tabel 4. Pemetaan Cagar Budaya dengan Konsep *Integrated Tourism*

No	Nama Obyek Cagar Budaya	Bentuk Cagar Budaya	Aspek Pengembangan
1	Benteng Pendem (<i>Kustbatterij op de Landtong te Cilacap</i>)	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
2	Watu Lingga	Benda	Wisata Edukatif (Era Hindu Budha)
3	Mesjid Agung Darussalam	Bangunan	- Wisata Relig - Wisata Edukatif (Era Islam)
4	Situs Candi Jambu	Situs	Wisata Edukatif (Era Hindu Budha)
5	Benteng Karang Bolong	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
6	Benteng Klingker atau <i>Banju Njappa</i>	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
7	Rumah Dinas Stasiun Kroya No. 1	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
8	Rumah Dinas Stasiun Kroya No. 2	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
9	Rumah Dinas PT KAI Kroya 3a/3b	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
10	Rumah Dinas PT KAI Kroya 5a	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
11	Rumah Dinas PT KAI Kroya 5b	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
12	Rumah Dinas PT KAI Kroya 6a	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
13	Rumah Dinas PT KAI Kroya 6b	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
14	Rumah Dinas PT KAI Kroya 7	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
15	Rumah Dinas PT KAI Kroya 8a	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
16	Rumah Dinas PT KAI Kroya 16	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
17	Rumah Dinas PT KAI Kroya 17	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
18	Rumah Dinas PT KAI Kroya 18	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
19	Rumah Tinggal No. 19	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
20	Bedeng PT KAI No 1a,	Bangunan	Wisata Edukatif

	2a, 3a, 4a, s.d.10a		(Era Kolonial)
21	Stasiun Maos	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
22	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 13	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
23	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 14	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
24	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 15	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
25	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 17	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
26	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 18	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
27	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 19	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
28	Rumah Dinas Stasiun Maos No. 20	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
29	Stasiun Kesugihan	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
30	Rumah Dinas Stasiun Kesugihan No. 1	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
31	Stasiun Karangandri	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
32	Rumah Dinas Stasiun Karangandri No. 1	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
33	Rumah Dinas Stasiun Karangandri No. 2	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
34	Stasiun Gumilir	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
35	Rumah Dinas Stasiun Gumilir 2	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
36	Rumah Dinas Stasiun Gumilir 3	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
37	Rumah Dinas Stasiun Cilacap 1	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
38	Rumah Dinas Stasiun Cilacap 2	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
39	Rumah Tinggal BRI 1	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
40	Rumah Tinggal BRI 2	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
41	Rumah Tinggal No. 44	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
42	Rumah Tinggal No. 48	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
43	Rumah Tinggal	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
44	Rumah Pelabuhan	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)

45	Dermaga Pelabuhan I	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
46	Bunker Tanjung Intan 1	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
47	Bunker Tanjung Intan 2	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
48	Stasiun Jeruklegi	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
49	Rumah Dinas Stasiun Jeruklegi No.1	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
50	Rumah Dinas Stasiun Jeruklegi No. 2	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
51	Rumah Dinas Stasiun Jeruklegi No. 2a	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
52	Stasiun Kawunganten	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
53	Rumah Dinas Stasiun Kawunganten 3a	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
54	Rumah Dinas Stasiun Kawunganten 3b	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
55	Stasiun Gandrungmangu	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
56	Rumah Dinas Stasiun Gandrungmangu No. 1	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
57	Rumah Dinas Stasiun Gandrungmangu No. 2	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
58	Stasiun Sidareja	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
59	Rumah Sinder Kebunkaret Cilongkrang	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
60	Kantor Afdeling	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
61	Rumah Dinas PT KAI Meluwung 1	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
62	Rumah Dinas PT KAI Meluwung 2	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
63	Rumah Dinas PT KAI Meluwung 3	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
64	Rumah Dinas Stasiun Bedengan 1a s.d. 4a	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
65	Stasiun Cipari	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
66	Rumah Dinas Stasiun Cipari I	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
67	Makam Sumolangu (Mahfud Abdurrohman)	Situs	- Wisata Religi - Wisata Edukatif (Era Penyebaran)

			Islam)
68	Benteng Jepang Gunung Selok 1	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Jepang)
69	Benteng Jepang Gunung Selok	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Jepang)
70	SMP Negeri 8	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
71	Benteng Jepang Pendem 4	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Jepang)
72	Bangunan E4 Mes	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
73	Kantor Kasdim (Wakil Dandim)	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
74	Rumah Dinas Dandim	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
75	Rumah Piket Kodim Cilacap	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
76	Sanggar Pramuka Kodim	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
77	Kantor Minivet AD	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
78	Kantor Dinas Pariwisata Cilacap	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
79	Makam Hong Bangkong Suralaka	Situs dan Bangunan	Wisata Edukatif
80	Makam Kerkhof	Situs dan Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial)
81	Lonceng Kuno	Benda	Wisata Edukatif (Era Pra Kolonial)
82	Pintu Gerbang Kantor Bupati	Benda	Wisata Edukatif (Era Pra Kolonial)
83	Tempat Tidur Bupati I	Benda	Wisata Edukatif (Era Pra Kolonial)
84	Stasiun Cilacap	Bangunan	Wisata Edukatif (Era Kolonial dan Jepang)

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi wisata Cilacap sebagai wisata edukasi sangatlah besar, terutama pada aspek wisata kolonial. Hal ini dikarenakan Cilacap merupakan salah satu kota penting pada zaman Hindia Belanda, sehingga pada saat itu pembangunan infrastruktur kota Cilacap sangatlah pesat.

Ucapan Terima Kasih

Apresiasi disampaikan kepada Kemenristekdikti, karena penelitian ini didanai sepenuhnya oleh Kementerian melalui dana hibah kompetitif Penelitian Dosen Pemula. Selain itu, terimakasih juga disampaikan kepada jajaran pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Daftar Pustaka

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. (2016). *Laporan Inventarisasi Cagar Budaya*.
- _____. (2016). Data Jumlah Obyek Wisata dan Lainnya di Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2016.
- Dangi, T. B. dan T. Jamal. 2016. An Integrated Approach to “Sustainable Community-Based Tourism”. *Sustainability*. Nomor 8 (475), pp. 1-7.
- Hero Idyel. (2011). *Pariwisata Cilacap*. <https://heroidyel.wordpress.com/2011/07/05/pariwisata-cilacap/>, diakses tanggal 10 Mei 2016.
- Monzonis, J. S. (2014). Prospective Analysis of Rural Tourism: Case Study In The Comunitat Valenciana. *Cuadernos de Turismo*. No. 34, p. 431-434.
- Mulyana, Deddy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursyn-Kupisz, Monika dan Dzialek, Jaroslaw. (2013). Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Vol. 3, No. 1*, pp. 35-54.
- Nurfindarti, E., dan D. Zulkaidi. (2012). *Strategi Pengelolaan Cagar Budaya Kota Bandung. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V4N1*.
- OECD Tourism Committee. (2010). *Tourism 2020: Policies to Promote Competitive and Sustainable Tourism*. OECD.
- Ontario Ministry of Tourism. (2009). *Ontario Cultural and Heritage Tourism Product Research Paper*. Queen’s Printer for Ontario.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2014 Tanggal 11 Agustus 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. (2015). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Cilacap Tahun 2014*. Cilacap.
- Silva. (2015). *Pariwisata Menyumbang Devisa RP 172 Triliun*. <http://www.venuemagz.com/artikel/news/2015/10/tahun-2016-pariwisata-menyumbang-devisa-rp172-triliun/>, diakses tanggal 10 Mei 2016.
- Stetic, S. (2012). Specific Features of Rural Tourism Destinations Management. *Journal of Settlements and Spatial Planning, Special Issue, Vol. 1*, p. 131-137.
- Stetic, S., S. Pavlovic, S. Stanic, dan D. Simicevic. (2014). Dimensions of Integrated Tourism – Case Studies of Selected Villages in the Serbia-Romania Border Area. *Journal of Settlements and Spatial Planning, Special Issue, No. 3*, p. 80-88.
- Sunardi. (2016). Kandidat Doktor Unissula Desak Perlindungan Cagar Budaya, tersedia pada http://pdih.unissula.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=17:kandidat-doktor-unissula-desak-perlindungan-cagar-budaya&catid=2, diunduh tanggal 07 Februari 2017.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS.
- Tani, Yuichiro; Hashimoto, Shizuka; dan Ochiai, Mototsugu. (2016). What makes rural, traditional, cultures, more sustainable? Implications from conservation efforts in mountainous rural communities of Japan, tersedia pada *Landscape Research*, DOI: 10.1080/01426397.2016.1184631.
- UNESCO. Sustainable Development. <http://whc.unesco.org/en/sustainabledevelopment/>, diakses tanggal 14 Mei 2016.
- Wibowo, M. Unggul. (2001). *Nusakambangan: Dari Poelaoe Boei Menuju Pulau Wisata*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.

Armiyati

Narasumber:

Joko Waluyo, Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Wawancara tanggal 16 Mei 2017.

M. Unggul Wibowo, sejarawan dan guru sejarah SMA N 3 Kabupaten Cilacap. Wawancara tanggal 15 Mei 2017.